

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar : syakir Media Press, 2021).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
- Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Firmansyah, Hery. *Menuju Keadilan Substantif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).
- Ftakhurohman et al. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Hakim, Lukman. *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan,"*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Kanter, E. Y dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2018).
- Marbun, Andreas N. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. (Jakarta: MaPPi FHUI, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Muanifah, Suciati et al. *Internal Audit*. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2022).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).

- Rosyadi, Imron et al. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: UBHARA Press, 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. (Jakarta: Laskar Perubahan, 2013).

B. Jurnal

- Bambang Murtianto, Thomas. “Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara”. *Jurnal Hukum Novum Argumentum*. Vol. 1, No. 1 Tahun 2022.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1 Tahun 2020.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi”. *Jurnal El-Faqih*. Vol. 5, No. 1 Tahun 2019.
- Hasan, Zainudin et al. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9, No. 15 Tahun 2023.
- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol. 1, No. 1 Tahun 2021.

- Kaldera, Nawang Xalma et al. "Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara". *Jurnal Fundamental JUSTICE*. Vol. 1, No. 2 Tahun 2020.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman". *Jurnal El-Dusturie*. Vol. 1, No. 1 Tahun 2022.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 8, No. 1 Tahun 2020.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10, No. 1 Tahun 2019.
- Setiawan, Irfan dan Christin Pratami Jesaja. "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)". *Jurnal Media Birokasi*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)*.

- _____. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).*
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).*
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).*
- _____. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).*
- _____. *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181).*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di*

Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213).

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109).*

_____. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273).*

_____. *Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.*

_____. *Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.*

D. Skripsi

Maulana, Rian “Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan PN No: 123/Pid.Sus/2014/PNJKT.TIM)”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Tahun 2017.

E. Internet

Alvaro, Jairo Acuna dan Matilde Mordt. “The Anti-corruption Formula”, <https://www.undp.org/latin-america/blog/anti-corruption-formula>, 5 Mei 2022.

Anonim. “KPK : 60% PNS Instansi Pelayanan Publik Lakukan Pungli”, <https://news.detik.com/berita/d-1075788/kpk-60-pns-instansi-pelayanan-publik-lakukan-pungli>, 28 Januari 2009.

- Anonim. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, 28 Desember 2017.
- Anonim. “Sekilas KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, 1 Januari 2023.
- Anonim. “Teori-Teori Pemidanaan”, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan/>, 2 Maret 2024.
- Antara. “66 pegawai KPK pelaku pungli di rutan akhirnya dipecat”, <https://www.antaranews.com/berita/4072869/66-pegawai-kpk-pelaku-pungli-di-rutan-akhirnya-dipecat>, 24 April 2024.
- BBC NEWS INDONESIA. “Sidak etik skandal rutan KPK, sebanyak 78 pegawai dijatuhi sanksi berat – ‘Komisi ini hancur, harus di-install ulang’”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1l7ey51njno>. 15 Januari 2024.
- Monica, Putri. “Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Serius Rp100 juta Lebih?”, <https://www.inilah.com/gaji-dan-tunjangan-pegawai-kpk>. 18 Januari 2024.
- Muhamad, Nabilah. “Jokowi Beri Tunjangan Kinerja Pegawai KPK hingga Rp33,2 Juta”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/21/jokowi-beri-tunjangan-kinerja-pegawai-kpk-hingga-rp332-juta>, 21 Agustus 2023.
- Nufus, Wilda Hayatun. “Pungli di Rutan KPK: Bawa Masuk HP Rp 10-20 Juta, Ngecas Rp 200-300 Ribu”. <https://news.detik.com/berita/d-7149080/pungli-di-rutan-kpk-bawa-masuk-hp-rp-10-20-juta-ngecas-rp-200-300-ribu>. 19 Januari 2024.
- Priasmoro, Muhammad Radityo. “Terungkap, Begini Modus Pungli Pegawai Rutan KPK”. <https://www.liputan6.com/amp/5344737/terungkap-begini-modus-pungli-pegawai-rutan-kpk>. 14 Juli 2023.
- Putri, Zunita. “Survei CSIS: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Nomor 2 dari Bawah”. <https://news.detik.com/berita/d-7111465/survei-csis-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik-kpk-nomor-2-dari-bawah>. 27 Desember 2023.
- Sari, Putri Purnama. “Menggiurkan! Segini Gaji Jaksa dan Tunjangan di Setiap Golongan”, <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/nbwP7Qjk-menggiurkan-segini-gaji-jaksa-dan-tunjangan-di-setiap-golongan#:~:text=Seorang%20Jaksa%20mendapatkan%20gaji%20dan,Pemerintah%20Nomor%207%20Tahun%201977.> 8 Desember 2023.

- Sisma, Annisa, Fianni.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. 18 Oktober 2022.
- Transparency International, “Pelemahan Jadi Nyata”, <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/ID-TII-ACA-Assessment-KPK-2023.pdf>. 2023
- Universitas Medan Area, “Toeri-teori Penyebab Korupsi”, [Teori-Teori Penyebab Korupsi - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](https://uma.ac.id), 27 Agustus 2021.
- Yanuari, Fira Saputri. “Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan”. <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>. 7 April 2021.